Puluhan Nakes di Kabupaten Pasuruan Gelar Unjuk Rasa. Tolak RUU Kesehatan Omnibus Law

Senin, 8 Mei 2023

Puluhan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Pasuruan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Pasuruan pada Senin (08/05/2023). Mereka menolak RUU Kesehatan Omnibus Law yang dinilai bermasalah karena tidak melibatkan organisasi profesi nakes dalam pembahasannya. Para nakes menganggap beberapa pasal dalam RUU Kesehatan mengancam pelindungan hukum terhadap profesi mereka dan melemahkan eksistensi organisasi profesi.

Salah satu pasal yang menjadi sorotan adalah pasal 326 dan 327 yang dinilai mengancam nakes dengan tuntutan hukum terkait pelayanan kepada masyarakat, bahkan dengan dugaan kelalaian saja. RUU Kesehatan juga dinilai melemahkan peran dan kewenangan organisasi profesi nakes yang selama ini berperan penting dalam pendampingan dan kontrol kualitas kompetensi para tenaga kesehatan.

Ketua IDI Kabupaten Pasuruan, Arif Junaedi, menyatakan bahwa pemerintah membuat draft RUU Kesehatan tanpa melibatkan organisasi profesi nakes. Sementara itu, Ketua PPNI Kabupaten Pasuruan, Kholili, menyoroti kebijakan Surat Tanda Registrasi (STR) seumur hidup yang dinilai berpotensi mengancam kualitas kompetensi nakes.

Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Pasuruan, Abdul Roup, mengatakan pihaknya sudah melakukan audiensi dengan para nakes dan akan menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan RUU Omnibus Law kepada DPR RI. DPRD Kabupaten Pasuruan berharap RUU Kesehatan dapat diubah menjadi undang-undang yang adil dan bijaksana.

Aksi damai yang dilakukan para nakes ini merupakan salah satu dari sekian banyak penolakan RUU Kesehatan Omnibus Law di berbagai daerah di Indonesia. RUU ini menuai kontroversi dan mendapat banyak penolakan dari berbagai pihak, termasuk organisasi profesi nakes. Para nakes berharap RUU Kesehatan dapat diubah agar tidak merugikan profesi mereka dan masyarakat.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.